



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN

JALAN AUP NO.1, PASAR MINGGU, JAKARTA 12520, PO BOX 7239/PSM
TELEPON (021) 7806874, 78830275, FAKSIMILE (021) 7805030, 78830275
LAMAMAN: www.politeknikaup.ac.id

KEPUTUSAN

DIREKTUR POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN
NOMOR 35/POLTEK-AUP/RC.221/I/2021

TENTANG

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN
TENTANG RENCANA STRATEGIS POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelarasan kegiatan Politeknik Ahli Usaha perikanan terhadap program dan kegiatan Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan dan adanya perubahan organisasi Sekolah Tinggi Perikanan menjadi Politeknik Ahli Usaha Perikanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan tentang Tentang Rencana Strategis Politeknik Ahli Usaha Perikanan Tahun 2020-2024.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009;
 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Praturan Presiden Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 1993 tentang pendirian Sekolah Tinggi Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 126 Tahun 2000 tentang pendirian Sekolah Tinggi Perikanan;

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 45/PERMEN-KP/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ahli Usaha Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2020 tentang Statuta Politeknik Ahli Usaha Perikanan;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 09/MEN-KP/KP.430/VI/2020 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dosen yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Lampiran dalam Keputusan Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan Nomor 50 /POLTEK-AUP/RC.221/I/2021 tentang Rencana Strategis Politeknik Ahli Usaha Perikanan Tahun 2020-2024, menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan ini.

Pasal 2

Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2021
Direktur,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN
NOMOR 35/POLTEK-AUP/RC.221/I/2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS POLITEKNIK AHLI
USAHA PERIKANAN TAHUN 2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan pembangunan kelautan perikanan jangka panjang pada periode Pembangunan Tahap IV (2020-2024) lebih ditegaskan melalui perwujudan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Dalam situasi demikian, Politeknik Ahli Usaha Perikanan (Politeknik AUP) harus lebih mampu menjadi jembatan antara proses pendidikan dengan dunia kerja dan kebutuhan pasar kerja secara nyata. Hal ini ditegaskan dalam Permen KP Nomor 45/PERMEN-KP/2019 Pasal 2 yang mana tugas Politeknik AUP adalah menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan. Oleh karena itu Politeknik AUP yang menyelenggarakan pendidikan vokasional harus merancang kurikulum dan implementasinya berorientasi pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang menjadi okupasi pekerjaan bagi lulusan sehingga menjadi aktor Utama di Sektor Kelautan Perikanan.

Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas lulusan di Politeknik AUP sangat perlu terus dikembangkan pada kemampuan berwirausahaberdaya saing tinggi dalam bidang kelautan dan perikanan, dengan kompetensi dan sertifikasi yang melekat di dalamnya. Pengembangan kemampuan berwirausaha pada pendidikan di Politeknik AUP harus bersifat komprehensif dan terintegrasi, baik dari kurikulumnya, penyelenggaraan pendidikan, sarana dan prasarana pendidikannya serta keilmuannya. Oleh karena itu lulusan Politeknik AUP mempunyai kemampuan mengembangkan wirausaha di bidang penangkapan

ikan, mesin perikanan, budidaya, pembenihan, pengolahan dan pemasaran serta pengelolaan sumberdaya perairan dan penyuluhan.

Lulusan yang menjadi pengusaha pemula di bidang kelautan dan perikanan saat ini masih dirasakan sangat kurang, baik dalam jumlah maupun kualitas. Oleh karena itu pengelolaan pendidikan di Politeknik AUP yang berorientasi wirausaha mutlak dilaksanakan untuk pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan yang lebih optimal dan mampu menjadi raja di negeri sendiri, tanpa terus menerus menjadi pekerja.

Renstra Politeknik AUP merupakan penjabaran dari Renstra Pusdik KP yang ditetapkan melalui Peraturan Kapusdik KP Nomor 195/PER-BRSDM.4/2020 serta Renstra BRSDMKP yang telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala BRSDMKP Nomor 12/PER-BRSDM/2020 tentang Rencana Strategis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan Pendidikan KP Tahun 2020 – 2024.

Renstra BRSDM menjelaskan Visi KKP yaitu “Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Keberadaan Pusdik KP memiliki peran yang strategis dalam mendukung visi dan misi KKP dimaksud. Dukungan tersebut dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pendidikan kelautan dan perikanan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM yang mengikuti perkembangan era globalisasi dan ekonomi digital dengan mewujudkan lembaga pendidikan yang bertaraf internasional.
2. Mencetak SDM unggul yang mampu bersaing sesuai dengan kebutuhan dunia usaha/industri sehingga semua lulusan dapat berkarya baik bekerja di DUDI dan menjadi wirausaha yang handal.
3. Meningkatkan pendidikan SDM dan perluasan akses pendidikan vokasi bagi anak pelaku usaha KP, terbentuknya Lembaga pendidikan Baru yang lebih dekat dengan anak pelaku utama perikanan.
4. Mewujudkan pelaku utama yang mandiri, kompeten, sadar /peduli terhadap inovasi teknologi, kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan, bagi nelayan dan pelaku utama dibidang kelautan dan perikanan.

5. Mewujudkan tatakelola riset dan SDM yang baik dan melakukan kerjasama dengan lembaga/instansi dalam dan luar negeri, dengan terwujudnya kerjasama lembaga pendidikan luar negeri.

Keberadaan Politeknik AUP menjadi strategis dengan mendukung tugas Pusat pendidikan KP selaras dengan rencana pengembangan dan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di masa mendatang dimana Iptek sangat dibutuhkan masyarakat. Perkembangan IPTEK yang pesat di era revolusi industri 4.0. menuntut adanya perubahan tatanan kehidupan baru yang berbasis teknologi (*technology based*). *Cyber-physical system* (CPS) dalam Industri 4.0.

Peran strategis keberadaan Politeknik AUP juga dalam mendukung visi dan misi tersebut melalui upaya:

1. Menetapkan kurikulum vokasi perikanan berbasis usaha;
2. Meng-up *grading* dosen untuk melaksanakan pendidikan vokasi;
3. Melaksanakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan model vokasi;
4. Menjalin kemitraan yang sinergi dengan unit bisnis;
5. Menyediakan galeri teknologi yang dibutuhkan masyarakat dan pelaku usaha untuk kemajuan usahanya;
6. Menghasilkan inovasi teknologi komersial;
7. Menyediakan galery (*hard & soft*) teknologi yang dihasilkan;
8. Melaksanakan pelatihan kepada masyarakat di desa mitra dan non mitra;
9. Melaksanakan transfer teknologi kepada masyarakat desa mitra dan non mitra;
10. Memfasilitasi terjadinya inkubasi *start up* bisnis perikanan di desa mitra;
11. Memaksimalkan pelayanan administrasi terhadap kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
12. Mengoptimalkan pelayanan sumberdaya (5 M) terhadap kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
13. Sinergitas pelaksanaan KISS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
14. Menyelenggarakan pembinaan taruna dan tata kehidupan kampus untuk mewujudkan lulusan unggul dan kehidupan kampus yang edukatif dan produktif serta suasana kampus nyaman dan asri;

1.2. Kondisi Umum

Program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan harus menjadi acuan pengembangan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan melalui pendidikan formal yang dilaksanakan oleh PoliteknikAUP. Melalui kegiatan pendidikan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan yang dihasilkan diharapkan menjadi sumberdaya manusia unggul.

Pengembangan kelembagaan pendidikan dan kemampuan lulusan pendidikan kelautan dan perikanan harus terus menerus dilakukan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang berguna bagi dunia usaha dan industri. Sumberdaya manusia yang demikian merupakan salah satu pilar yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi kelautan dan perikanan. Pada saat ekonomi kelautan dan perikanan kokoh dan maju pesat, maka meningkat pula perekonomian nasional yang berdampak kepada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, PoliteknikAUP adalah pendidikan vokasi yang menghasilkan sumberdaya unggulbidang kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Sarjana Terapan Perikanan dan Pascasarjana Terapan lulusan Politeknik AUP mampu memenuhi tuntutan kebutuhan sumberdaya manusia di kelautan dan perikanan bagi pasar nasional, regional maupun internasional.

Politeknik AUP telah mempunyai sarana dan prasarana yang memadai dan telah mempunyai organisasi yang kuat. Jumlah tenaga pendidikan 100 orang Dosen Tetap dan 32 Orang Dosen Tidak Tetap.

Lembaga penunjang pendidikan yang dimiliki oleh PoliteknikAUP antara lain: Laboratorium Dasar (biologi, kimia dan fisika), Instalasi Navigasi/GMDSS, Simulator, Laboratorium, Unit Perpustakaan, Workshop, Bengkel Perikanan, Unit Sertifikasi (BST), Unit Sarana Latihan Laut, Unit Sarana Latihan Darat, Unit Komputer, Unit Sarana Pembudidayaan, Unit Sarana Pengolahan Ikan, Unit Sarana Penyuluhan, Unit Sarana Konservasi , dan unit penunjang lainnya.

Lembaga penunjang pendidikan tersebut kondisinya sesuai dengan perkembangan yang dibutuhkan dalam dunia pendidikanvokasi, kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat para dosen dan taruna, juga sudah dilengkapi oleh berbagai sarana penunjang lainya seperti asrama, poliklinik,

kantin, tempat ibadah, tempat parkir, dan taman, yang kondisinya juga sangat mendukung terciptanya kegiatan yang nyaman. Dalam melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Politeknik AUP juga melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga/institusi baik di tingkat nasional dan internasional.

1.3. Potensi

Keberadaan Politeknik AUP sangat penting dan strategis bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan khususnya dalam hal pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan, karena :

1. Potensi kelautan dan perikanan Indonesia yang sangat besar dan memerlukan sumberdaya manusia yang profesional dan produktif, dengan kemampuan bisnis;
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mencanangkan Revolusi Biru yaitu perubahan mendasar cara berfikir dari orientasi daratan menjadi orientasi maritim dengan konsep pembangunan berkelanjutan untuk peningkatan produksi kelautan dan perikanan melalui program yang terintegrasi;
3. Meningkatkan SDM kelautan dan perikanan pada perguruan tinggi vokasi yang lebih menitikberatkan Dunia Usaha dan Dunia Industri yang dilengkapi dengan kompetensi yang bersertifikat, kemudian penerapan teknologi yang relevan dan terjual untuk mengantisipasi tantangan pembangunan kelautan dan perikanan di masa datang;
4. Politeknik AUP merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki Program Pascasarjana Terapan di bidang kelautan dan perikanan satu-satunya di Indonesia;
5. Okupasi lulusan Politeknik AUP di sektor kelautan dan perikanan sangat luas. Secara garis besar okupasi yang diisi lulusan menurut catatan selama ini adalah Aparatur Sipil Negara diberbagai unit kerja baik struktural maupun fungsional, perusahaan, pengusaha, konsultan, perbankan dan media.

Beberapa keunggulan dan karakteristik yang dimiliki Politeknik AUP adalah :

1. Keunggulan komparatif
 - (a) Penyelenggaraan pendidikan vokasi dengan rasio kegiatan praktik jauh lebih banyak dibanding teori (70 : 30%);
 - (b) Penerapan pembinaan kehidupan kampus dengan kedisiplinan yang tinggi, sehingga para lulusan pekerja keras, produktif dan memiliki daya juang yang tinggi;
 - (c) Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi kelautan dan perikanan yang memenuhi standar internasional sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan dunia usaha dan dunia industri;
 - (d) Sarana dan prasarana pendidikan yang memadai untuk setiap Program Studi.

2. Keunggulan Kompetitif
 - (a) Lulusan unggul karena memiliki kecerdasan yang produktif dan kemampuan beradaptasi serta ketahanan fisik dan mental yang tinggi untuk bekerja di dunia usaha dan dunia industri;
 - (b) Memiliki sertifikat kompetensi di bidang kelautan dan perikanan;
 - (c) Memenuhi kualifikasi standar internasional (kemampuan mengoperasikan dan manajemen serta skill yang mumpuni);
 - (d) Memiliki sertifikat manajemen mutu ISO 9001:2000.

Model pendidikan di Politeknik AUP didesain sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan lulusan yang unggul, baik dalam aspek bisnis, teknologi terapan, kemasyarakatan serta kedisiplinan.

Dengan karakteristik lulusan yang demikian, ke depan dapat lahir generasi baru pelaku usaha (*Start-up*) kelautan dan perikanan dari lulusan Politeknik AUP, sehingga menjadi aktor utama dalam pembangunan kelautan dan perikanan.

1.4. Permasalahan

Permasalahan sekaligus peluang sektor kelautan dan perikanan yang meliputi berbagai aspek, sangat menuntut kesiapan sumberdaya manusia untuk mengatasi permasalahan tersebut. Permasalahan ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menyusun strategi dan kebijakan pengembangan SDM

unggul dimasa kini dan masa datang. PoliteknikAUP merupakan aset strategis menghadapi permasalahan kelautan dan perikanan, karena muara dari permasalahan ini pada prinsipnya adalah kelemahan sumberdaya manusia pelaku utama kelautan dan perikanan. Permasalahan dan peluang sektor kelautan dan perikanan itu meliputi :

1. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya ikan di perairan laut dan budidaya ikan untuk dikelola sebagai sumber pendapatan;
2. Penyelenggaraan pendidikan vokasi KP masih banyak keterbatasan;
3. SDM lulusan *mind set* nya masih ingin jadi Aparatur Sipil Negara;
4. SDM lulusan belum menjadi aktor utama dalam dunia usaha dan dunia industri (DUDI) serta Unit Kerja lainnya di sektor kelautan dan perikanan;
5. Teknologi terapan yang dihasilkan masih belum komersial di masyarakat dan DUDI;
6. Proses inkubator oleh perusahaan bagi taruna dan lulusan untuk menjadi *Start-up* masih minim;
7. Transfer teknologi dan peningkatan kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan masih kurang;
8. Ketatnya persaingan dunia kerja dan kebijakan penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi para lulusan Politeknik AUP belum mendukung.

Permasalahan yang secara khusus terjadi PoliteknikAUP yang perlu segera dilakukan pembenahan adalah:

1. Lulusan Politeknik AUP belum menjadi prioritas pilihan bagi *stakeholder* kelautan dan perikanan;
2. Politeknik AUP masih belum menjadi BLU;
3. Pascasarjana Terapan S3 belum dibuka
4. Tata kelola Pendidikan Vokasi belum sepenuhnya mengacu pada PP 62/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan;
5. Jejaring kerja dalam dan luar Negeri yang masih terbatas;
6. Pelayanan Birokrasi untuk penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi vokasi belum Optimal.

1.5. Lingkungan Strategi

Penyelenggaraan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan membawa konsekuensi mewujudkan Politeknik AUP sebagai kampus yang kental dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Implikasinya harus mampu menyediakan lulusan sesuai dengan kebutuhan DUDI kelautan dan perikanan dan ASN. Oleh karena itu bermitra dengan DUDI mutlak harus dilakukan, diawali dengan perusahaan itu dijadikan inkubator bisnis kelautan dan perikanan bagi para taruna dan lulusan. Hasil dari pendidikan model seperti ini adalah sumberdaya manusia unggul untuk pengelolaan usaha perikanan dan cocok dengan yang dibutuhkan oleh *user*.

Politeknik AUP adalah merupakan unit kerja yang juga dapat menghasilkan teknologi. Adanya Tri Dharma Perguruan Tinggi, itu suatu lingkungan strategis untuk dilaksanakan penelitian oleh para dosen dan taruna, yang *outcomenya* adalah teknologi. Kekhasan dari pendidikan vokasi adalah menghasilkan teknologi terapan yang dapat membantu masyarakat dan pelaku usaha di dalam pengembangan usahanya. Adanya interaksi antara teknologi dari kampus kepada pengguna dan masyarakat membawa Politeknik AUP menjadi Pusat Teknologi Terapan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha dan masyarakat. Yang menjadi aktornya adalah para dosen dan taruna.

Implementasi dari Dharma Perguruan Tinggi yang ketiga PoliteknikAUP harus mentransfer teknologi kepada masyarakat dan harus memberikan pelatihan dan bimbingan sehingga dapat memberikann kompetensi yang bersertifikat kepada masyarakat. Saluran untuk melaksanakan kedua kegiatan itu adalah pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh para dosen dan para taruna di desa mitra dan non mitra. Dengan dilaksanakannya kedua kegiatan tersebut, maka masyarakat akan dapat mengembangkan usahanya yang lebih menguntungkan dan mudah untuk mendapat pekerjaan, karena memiliki sertifikat yang disyaratkan. Adanya kewajiban melaksanakan pengabdian masyarakat dan memiliki desa mitra, itu merupakan lingkungan strategis untuk mewujudkan Politeknik AUP sebagai rujukan masyarakat dalam menyelesaikan masalah dalam berusaha dan ketenagakerjaan.

Kebijakan Pemerintah untuk mempersingkat birokrasi dan meningkatkan pelayanan birokrasi sangat cocok untuk diterapkan di Politeknik AUP, mengingat

Politeknik AUP membutuhkan keharmonisan dari beberapa kegiatan yang secara paralel harus dilaksanakan dengan sasaran yang sama yaitu taruna. Ada Tri Dharma Perguruan Tinggi yang isinya tiga kegiatan, ada pembinaan mental dan disiplin taruna yang berlaku 24 jam dan ada menata sarana prasarana supaya tetap dapat digunakan secara fungsional dan produktif. Strategi peningkatan pelayanan birokrasi yang menerapkan fungsi manajemen untuk menggunakan unsur manajemen secara dinamis, merupakan lingkungan strategis bagi tercapainya harmonisasi semua kegiatan yang ada di Kampus Politeknik AUP yang dimotori oleh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga berujung kepada tercapainya pelayanan birokrasi yang produktif dan memenuhi standar ISO.

1.6. Isu - Isu Strategis

Kebutuhan sumberdaya manusia unggul untuk mengembangkan usaha dan industri perikanan sesuai arahan Presiden pada saat pelantikan. Kebijakan tersebut diturunkan kepada Kebijakan KKP yaitu untuk membangun SDM unggul menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 di bidang penguatan Sumberdaya Manusia dan inovasi riset :

- a. Pendidikan vokasi;
- b. Pelatihan teknis untuk masyarakat;
- c. Sertifikasi kompetensi pelaku utama;
- d. Hilirisasi hasil inovasi dan riset.

Arah pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020–2024 di bidang penguatan Sumber Daya Manusia dan inovasi riset adalah pengembangan SDMKP yang unggul melalui strategi :

- a. Peningkatan kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan;
- b. Peningkatan inovasi teknologi dan riset bidang kelautan dan perikanan.

Dari arah pembangunan tersebut di atas, isu-isu strategis yang muncul di Politeknik AUP adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pendidikan vokasi belum optimal;
- b. Politeknik AUP belum menjadi Pusat Inovasi Teknologi bagi masyarakat dan pelaku usaha;
- c. Politeknik AUP belum menjadi rujukan masyarakat didalam mengatasi masalah kelautan dan perikanan;
- d. Pelayanan birokrasi belum optimal.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi Presiden 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong". Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden.

Visi KKP 2020-2024 adalah "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan" untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong"

Visi BRSDM dan Pusat pendidikan KP pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong melalui kegiatan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan berkualitas".

Visi Politeknik AUP selaras dengan visi Pusat Pendidikan KP yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan" untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong. Untuk memperkuat visi Politeknik AUP dalam mewujudkan "Politeknik AUP Menjadi 10 Besar Perguruan Tinggi Vokasi Bidang Kelautan Dan Perikanan Terbaik di Indonesia pada tahun 2024".

2.2 Misi

Misi Politeknik AUP selaras dengan misi BRSDM dan Pusat Pendidikan KP yaitu menjalankan misi Presiden dan KKP dalam bidang kelautan dan perikanan meliputi :

1. Misi ke-1 yakni Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP.
2. Misi ke-4 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Politeknik AUP.

2.3. Tujuan

Menjabarkan misi Politeknik AUP, sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan yang akan dicapai adalah:

1. Politeknik AUP menghasilkan sumberdaya manusia unggul yang mampu berkarya dan berwirausaha di pemerintahan, swasta, dan unit kerjalainnya yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan;
2. Politeknik AUP mewujudkan tata kelola pendidikan vokasi yang inovatif dan produktif sehingga mampu bersaing secara International.
3. Politeknik AUP mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Politeknik AUP.

2.4. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan kegiatan pendidikan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Politeknik AUP dengan mengacu pada Sasaran Kegiatan Pusdik KP sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa indikator yang ingin dicapai di bidang pendidikan KP. Sasaran kegiatan Pusdik KP adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1 Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat melalui kegiatan pendidikan KP
2. Sasaran Kegiatan 2 Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten
3. Sasaran Kegiatan 3 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan KP Yang Terstandar
4. Sasaran Kegiatan 4 Terselenggaranya Pengabdian Pendidikan Tinggi KP.
5. Sasaran Kegiatan 5 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Pusat Pendidikan KP.

Dengan memperhatikan sasaran kegiatan Pusdik KP dimaksud, maka sasaran kegiatan yang akan dicapai Politeknik AUP pada tahun 2020-2024 dengan mengacu pada sasaran strategis Pusat Pendidikan KP adalah sebagai berikut:

a. Sasaran Kegiatan Politeknik AUP Tahun 2020

1. Sasaran Kegiatan Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat melalui kegiatan:
 - a. Persentase lulusan Politeknik AUP Jakarta yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan (%) dengan target tahun 2020 sebesar 75%.
 - b. Persentase lulusan Politeknik AUP Jakarta yang melakukan rintisan wirausaha di bidang kelautan dan perikanan (%) dengan target tahun 2020 sebesar 5%.
 - c. Desa mitra pendidikan KP yang meningkat kompetensinya (Desa) dengan target tahun 2020 sebanyak 1 Desa.
 - d. Lulusan Politeknik AUP Jakarta yang besertifikat kompetensi (Orang) dengan target tahun 2020 sebesar 434 Orang.
 - e. Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten di Politeknik AUP Jakarta (Orang) dengan target tahun 2020 sebesar 1.514 Orang.
 - f. Sarana dan prasarana yang ditingkatkan kapasitasnya di Politeknik AUP Jakarta (Unit) dengan target tahun 2020 sebesar 1 Unit.
 - g. Jejaring dan/atau kerjasama Politeknik AUP Jakarta yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti (Dokumen) dengan target tahun 2020 sebesar 3 Dokumen.
 - h. Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik di Politeknik AUP Jakarta (%) dengan target tahun 2020 sebesar 50%.
 - i. Pendidik dan tenaga kependidikan Politeknik AUP Jakarta yang meningkat kompetensinya (Orang) dengan target tahun 2020 sebesar 23 orang.
 - j. Pengabdian pendidikan tinggi KP di Politeknik AUP Jakarta (Paket) dengan target tahun 2020 sebanyak 3 Paket.
 - k. Nilai hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan KP di Politeknik AUP Jakarta (Nilai) dengan target tahun 2020 sebesar 80.
2. Sasaran Kegiatan Tata kelola Pemerintahan yang baik melalui kegiatan:
 - a. Indeks Profesionalitas ASN Politeknik AUP Jakarta (Indeks) dengan target tahun 2020 sebesar 72.

- b. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik AUP Jakarta (Nilai) dengan target tahun 2020 sebesar 88.
- c. Persentase unit kerja Politeknik AUP Jakarta yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) dengan target tahun 2020 sebesar 82%.
- d. Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Politeknik AUP Jakarta dibandingkan realisasi anggaran Politeknik AUP Jakarta TA 2019 dengan target tahun 2020 sebesar 0%
- e. Nilai kinerja anggaran Politeknik AUP Jakarta (Nilai) dengan target tahun 2020 sebesar 85.

b. Sasaran Kegiatan Politeknik AUP Tahun 2021-2024

- 1. Sasaran Kegiatan 1 Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat melalui kegiatan pendidikan KP, didukung oleh indikator kinerja utama sebagai berikut :
 - a. Persentase Lulusan satuan pendidikan KP yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan(%) dengan target 2021 sebesar 75 % sampai dengan tahun 2024.
 - b. Lulusan satuan pendidikan KP yang melakukan rintisan wirausaha di bidang kelautan dan perikanan (orang) dengan target pada tahun 2021 dan 2022 sebanyak 40 orang, tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 sebanyak 50 Orang.

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran kegiatan dalam menghasilkan *outcome* sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* Politeknik AUP melalui Sasaran kegiatan dan indikator kinerja utama :

- 2. Sasaran Kegiatan 2 Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten, didukung oleh indikator kinerja utama sebagai berikut
 - a. Lulusan satuan pendidikan KP yang bersertifikat kompetensi (orang) dengan target pada tahun 2021 sebanyak 403 orang, tahun 2022 sebanyak 283 orang, tahun 2023 sebanyak 401 orang dan tahun 2024 sebanyak 446 orang.

- b. Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten (orang) dengan target pada tahun 2021 sebanyak 1.499 orang sampai dengan tahun 2024 1.549 orang.
 - c. Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik dengan target 2021 sebesar 55 % sampai dengan tahun 2024 sebesar 55 %.
 - d. Pendidik dan tenaga kependidikan yang meningkat kompetensinya dengan target pada tahun 2021 sebanyak 13 orang, tahun 2022 sampai 2024 sebanyak 20 orang.
3. Sasaran Kegiatan 3 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan KP Yang Terstandar
- a. Sarana pendidikan KP yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit) dengan target pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebanyak 1 Unit
 - b. Prasarana Pendidikan Tinggi KP yang ditingkatkan kapasitasnya dengan target tahun 2021 sampa dengan tahun 2024 sebanyak 1 Unit
4. Sasaran Kegiatan 4 Terselenggaranya Pengabdian Pendidikan Tinggi KP
- a. Penelitian Terapan Pendidikan Tinggi KP dengan target pada tahun 2021 sebanyak 1 paket sampai dengan tahun 2024.
 - b. Pengabdian kepada masyarakat KP target pada tahun 2021 sebanyak 1 paket sampai dengan tahun 2024.
5. Sasaran Kegiatan 5 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Politeknik AUP
- a. Kerjasama pendidikan kelautan dan perikanan yang disepakati dengan target pada tahun 2021 sebanyak 3 dokumen, 5 dokumen pada tahun 2020 sampai dengan 2024.
 - b. Nilai hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan KP dengan target tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebesar 81.
 - c. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK Politeknik AUP dengan target 2021 sebesar 100 % sampai dengan tahun 2024.
 - d. Indeks Profesionalitas ASN Politeknik AUP (Indeks) dengan target 2021 sebesar 73 Indeks sampai dengan tahun 2024.
 - e. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Politeknik AUP (Nilai) dengan target 2021 sebesar 80 sampai dengan tahun 2024.

- f. Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) dengan target 2021 sebesar 84 % sampai dengan tahun 2024.
- g. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik AUP dengan target 2021 sebesar 65 % sampai dengan tahun 2024.
- h. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Politeknik AUP (Nilai) dengan target 2021 sebesar 89 sampai dengan tahun 2024.
- i. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Politeknik AUP dengan target 2021 sebesar 86 Nilai sampai dengan tahun 2024.
- j. Unit kerja lingkup satker Politeknik AUP yang dibangun untuk diusulkan menuju WBK dengan target 2021 sebesar 1 satker sampai dengan tahun 2024.
- k. Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal dengan target 2021 sebesar 100 % sampai dengan tahun 2024.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

1.1. ARAH KEBIJAKAN NASIONAL PEMBANGUNAN KP

UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 2004, pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa **“pengelolaan perikanan bertujuan agar tercapainya manfaat secara optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan”**. Pencapaian tujuan pembangunan itu dilaksanakan dalam jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan dengan terencana. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dijadikan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Kerja Tahunan (RKT).

RPJMN 2020-2024 telah mengharuskan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan yang diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Agenda Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan
3. Agenda Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Agenda Membangun Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Agenda Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar.
6. Agenda Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

7. Agenda Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam rangka melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional (Prioritas Nasional) RPJMN 2020-2024, telah disusun Proyek Prioritas Strategis (Major Project) yang merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Major Project di KKP yaitu Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng, dan Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional. Selain itu KKP juga mendukung mayor project lainnya antara lain terkait dengan pariwisata dan Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan.

Pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional (Prioritas Nasional) dilakukan bersinergi antara KKP dengan K/L dan instansi lain yang terkait serta dengan Pemenintah Daerah dan Badan Usaha (BUMN/Swasta).

Strategi Agenda Pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas KKP antara lain adalah:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, yang meliputi Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, memperkuat komitmen pelaksanaan target SDG 14 Ekosistem Lautan (*Life Below Water*), dan Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, dengan strategi penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan daerah yang tersebar pada sentra-sentra hilirisasi pertanian dan perikanan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)/Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP);
3. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan strategi konservasi kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati di daratan maupun pesisir, perlindungan kerentanan pesisir dan sektor kelautan, dan pengembangan rendah karbon pesisir dan laut.

1.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Arah dan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, adalah sebagai berikut:

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEE dan laut lepas, peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup nelayan. Arah kebijakan ini menjabarkan misi KKP yang terkait dengan Peningkatan Kontribusi Ekonomi sektor KP (DJPT)
2. Mongoptimalkan dan memperkuat perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan protein dan nilai tambah melalui akses permodalan, dan perlindungan usaha budidaya. Arah kebijakan menjabarkan misi KKP yang terkait dengan Peningkatan kontribusi ekonomi sektor KP (DJPB)
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk, penguatan sistem karantina ikan, peningkatan nilai tambah untuk peningkatan devisa. Arah kebijakan menjabarkan misi KKP yang terkait dengan Peningkatan kontribusi ekonomi sektor KP. (DJPDS, BKIPM).
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau – pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait Arah kebijakan menjabarkan misi KKP yang terkait dengan Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. (PRL, PSDKP dan BKIPM).
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan. Arah kebijakan menjabarkan misi KKP yang terkait dengan Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Inovasi Riset

Untuk mencapai 5 arah kebijakan diatas, KKP melaksanakan kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di pusat dan daerah. Hal ini menjabarkan misi KKP terkait dengan Peningkatan tata kelola pemerintahan.

Strategi pelaksanaan arah kebijakan diatas adalah:

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEE dan laut lepas, peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup nelayan. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
 - a. Membuka komunikasi dengan stakeholder untuk harmonisasi kebijakan berbasis data, informasi dan pengetahuan yang faktual;
 - b. Perbaikan, penataan, dan penyederhanaan perizinan usaha di pusat dan daerah, termasuk sinergi dengan instansi lain yang terkait
 - c. Pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah, pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan, dan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan pasar ikan bertaraf internasional (Major Project RPJMN) dengan berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah dan badan usaha.
 - d. Eksplorasi perikanan di ZEE dan laut lepas
 - e. Fasilitasi dan pengembangan skema pembiayaan yang murah dan mudah diakses, optimalisasi peran LPMUKP
 - f. Peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan nelayan, pemberdayaan kelompok nelayan perempuan, perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil, penguatan kelembagaan nelayan, dan penguatan kelompok usaha bersana melalui pembentukan korporasi nelayan (Major Project RPJMN) berkoordinasi dengan kementerian Koperasi dan UKM dan pemerintah daerah.
 - g. Pengembangan lembaga pengelola WPP dan penguatan data stok sumberdaya ikan
 - h. Pengelolaan perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD).
 - i. Pengembangan armada perikanan, alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan yang ramah lingkungan.
 - j. Partisipasi dalam organisasi pengelolaan perikanan regional yang melingkupi perairan indonesia (RFMOs). Pengembangan kampung nelayan maju, bantuan premi asuransi nelayan, perluasan skema asuransi mandiri, Sertifikasi tanah nelayan.

- k. Pengaturan akses nelayan terhadap pengelolaan sumberdaya, kemudahan fasilitasi usaha dan investasi, dan pengembangan perikanan berbasis digital.
 - l. Pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT).
 - m. Penguatan Unit Pelaksana Teknis perikanan tangkap.
2. Perikanan budidaya dioptimalkan dan diperkuat untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan protein dan nilai tambah melalui akses permodalan, dan perlindungan usaha budidaya. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Akselerasi produk perikanan budidaya, ekstensifikasi lahan budidaya;
 - b. Pembangunan/revitalisasi tambak udang dan bandeng (Major Project RPJMN) berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah dan badan usaha;
 - c. Pengembangan perikanan budidaya air laut, payau dan tawar;
 - d. Pengembangan budidaya ikan hias, rumput laut, lobster;
 - e. Pengembangan pakan mandiri, pakan dari magot;
 - f. Pembangunan fasilitas perbenihan, produksi induk unggul dan benih bermutu;
 - g. Pengelolaan kluster kawasan budidaya berkelanjutan
 - h. Pengembangan kesehatan lingkungan budidaya dan pengujian residu produk perikanan budidaya untuk sertifikasi untuk ekspor;
 - i. Pelaksanaan sertifikasi cara budidaya Ikan yang Baik (CBIB), cara perbenihan ikan yang baik (CPIB), dan cara pembuatan pakan ikan yang baik (CPPIB);
 - j. Pembangunan dan penguatan sarana dan prasarana perikanan budidaya antara lain Balai Benih Ikan, unit perbenihan, dan Broodstock center.
 - k. Pembangunan dan penguatan infrastruktur perikanan budidaya antara lain meliputi tambak, kolam, saluran irigasi tambak, keramba jaring apung dan lain-lain;
 - l. Sertifikasi lahan dan asuransi usaha perikanan budidaya;
 - m. Penataan perizinan usaha budidaya pusat dan daerah, fasilitasi usaha dan investasi, dan sinergi perizinan dengan instansi terkait.

- n. Pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT);
 - o. Penguatan UPT perikanan budidaya;
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk, penguatan sistem karantina ikan, peningkatan nilai tambah untuk peningkatan devisa. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Perbaikan kualitas, kapasitas, dan produktifitas industri pengolahan;
 - b. Meningkatkan produksi, produktifitas, standardisasi, jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan;
 - c. Penataan rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik, penguatan sistem logistik ikan yang efisien, pemetaan dan pemantauan logistik hasil perikanan, Pemetaan logistik hasil Perikanan di daerah;
 - d. Pembinaan pelaku usaha perikanan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan, penguatan daya saing Unit Pengolah Ikan (UPI);
 - e. Pembinaan pelaku usaha perikanan dan penyedia layanan jasa logistik dalam rangka distribusi dan transportasi hasil perikanan;
 - f. Peningkatansarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan;
 - g. Pelaksanaan Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan untuk peningkatan konsumsi ikan masyarakat dalam rangka mengatasi stuntin;
 - h. Perluasan akses pasar dalam dan luar negeri, pengembangan sistem pemasaran produk berbasis digital, peningkatan promosi produk kelautan dan perikanan untuk skala internasional, penguatan branding produk perikanan kelautan Indonesia, pemetaan dan strategi akses pasar negara tujuan ekspor;
 - i. Pembinaan dan Pengelolaan Pasar Ikan, Pembangunan fasilitas pemasaran perikanan skala internasional (Mayor Project) K/L terkait, pemerintah daerah dan badan usaha;
 - j. Pemetaan preferensi, konsumsi dan kebutuhan ikan konsumen dalam negeri;
 - k. Peningkatan Partisipasi daerah dalam mendukung pemasaran produk kelautan dan perikanan;

- l. Penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) produk hasil KP, sertifikasi kelayakan pengolahan (SKP), sertifikasi SNI produk kelautan dan perikanan;
- m. Peningkatan unit penanganan dan unit pengolahan produk hasil KP,
- n. Pemenuhan kebutuhan bahan baku serta peningkatan nilai tambah UPI menuju *zero waste*;
- o. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana sistem rantai dingin dan peralatan pengolahan
- p. Peningkatan Ragam baru produk hasil kelautan dan perikanan, hilirisasi industri rumput laut dan sumber daya alam laut bernilai tambah;
- q. Fasilitasi kemudahan pelaku usaha dan investasi, pembiayaan, teknologi dan pasar dan didukung regulasi yang kondusif;
- r. Pelaksanaan uji terap produk inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
- s. Harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan, penerapan standardisasi mutu, sertifikasi dan ketelusuran produk (*traceability*), peningkatan sarana dan prasarana pengujian mutu;
- t. Pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT);
- u. Penguatan UPT mutu hasil perikanan dan karantina ikan/
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau – pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
 - a. Pengelolaan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan secara berkelanjutan termasuk penanganan pencemaran laut dan sampah plastik;
 - b. Peningkatan manajemen dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan;
 - c. Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan;
 - d. Peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil/ terluar;

- e. Peningkatan produksi dan usaha garam nasional, ekstensifikasi dan intensifikasi lahan garam, peningkatan kualitas garam;
- f. Pembangunan sarana prasarana di kawasan wisata bahari;
- g. Peningkatan jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi;
- h. Penguatan kelembagaan, masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diakui;
- i. Pengelolaan Biofarmakologi dan peningkatan pemanfaatan marine bioproduct dan bioteknologi, pengembangan rendah karbon pesisir dan laut;
- j. Fasilitasi perizinan pengelolaan perairan
- k. Pengelolaan dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir, Penyusunan RZ kawasan, KSN, KSNT yang ditetapkan oleh Peraturan Perundangan dan Rencana Aksi pengelolaan ruang laut
- l. Penyelesaian rencana zonasi laut, pengendalian pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil, termasuk penyelarasan RZWP3K dan RTRW Provinsi;
- m. Pemberantasan IUU Fishing dan destructive fishing;
- n. Operasi armada pengasawan SDKP, operasional kapal pengawas, speed boat/RIB/rubber boat pengawas, operasi pencegahan (intercept) secara terintegrasi, kerjasama operasi pengawasan di laut;
- o. Pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif
- p. Penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan, penguatan Satgas pemberantasan Illegal Fishing;
- q. Pengawasan terhadap pelaku usaha kelautan dan perikanan yang diperiksa kepatuhannya;
- r. Penyadartahuan masyarakat KP dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang tertib dan bertanggungjawab;
- s. Operasional Pengawasan ekspor, impor dan domestik;
- t. Harmonisasi Sistem Perkarantina dan Keamanan Hayati Ikan dalam dan luar Negeri, sinergi pengawasn lalu lintas ikan, pelayanan tindak karantina di *entry* dan *exit point* serta pos lintas batas (*gateway*) wilayah perbatasan;

- u. Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan dan karantina ikan'
 - v. Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT);
 - w. Peningkatan UPT Pengelolaan Ruang Laut, Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan Karantina Ikan.
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Penguatan kegiatan riset yang dimanfaatkan oleh masyarakat, inovasi teknologi dan riset kemaritiman, kelautan dan perikanan, serta peningkatan *database* kelautan dan perikanan;
 - b. Penerapan Teknologi Adaptif Lokasi (TAL) Hasil Riset, diseminasi teknologi perikanan dan kelautan yang berkelanjutan dan produktif,
 - c. Pengembangan/pembentukan pusat unggulan riset kelautan dan perikanan;
 - d. Pengembangan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, termasuk yang berbasis digital;
 - e. Pengembangan kewirausahaan perikanan, pengembangan angkatan kerja perikanan generasi milenial, peningkatan daya saing SDM kelautan dan perikanan melalui diklat agar dapat terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri serta membentuk startup (usaha rintisan), penguatan literasi maritim;
 - f. Pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan yang bersertifikasi kompetensi;
 - g. Pembentukan kelompok kelautan dan perikanan mandiri;
 - h. Penguatan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan;
 - i. Peningkatan sarana dan prasarana riset, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan;
 - j. Peningkatan UPT riset, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kelautan dan perikanan;.

Arah Kebijakan Pengarustamaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 adalah:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
2. Gender;

3. Modal Sosial Budaya;
4. Transformasi Digital.

Pengarusutamaan dalam Renstra 2020-2024 KKP mengacu pada Dokumen RPJMN 2020-2024 yang telah menetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat *mainstreaming* ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan.

a. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

TPB/SDGs mencakup 17 Tujuan/Goal, 169 target, dan 241 indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antardimensi pembangunan yang saling berpengaruh. Dimensi pembangunan yang dimaksud meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan

KKP akan memperkuat komitmen pelaksanaan target TPB 14 Ekosistem Lautan (*Life Below Water*) yang mencakup diantaranya (1) mengurangi pencemaran laut termasuk sampah laut, (2) mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan, (3) meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut, (4) mengatur kuota penangkapan per wilayah agar sumber daya ikan tetap berkelanjutan, (5) melestarikan wilayah pesisir dan laut, (6) mengatur subsidi perikanan agar tidak berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebih, (7) meningkatkan manfaat ekonomi atas pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air dan pariwisata berkelanjutan, (8) meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan, (9) menyediakan akses untuk nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut dan pesisir, dan (10) meningkatkan pelestarian dan

pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menetapkan hukum internasional yang tercermin dalam *the United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*.

b. Gender

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilakukan adalah percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di semua bidang pembangunan di tingkat pusat, dan daerah, yang mencakup: (a) Penguatan 7 prasyarat PUG: komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, partisipasi masyarakat. (b) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); (c) Penyiapan roadmap PUG; (d). Pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi antar unit eselon I di KKP dan antar pusat-daerah; (g) Pembuatan profil gender; (h) Monitoring dan evaluasi serta pengawasan Pengarusutamaan Gender (PUG) KKP.

c. Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan local (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

Pembangunan kebudayaan ingin memastikan bahwa setiap penduduk memperoleh perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Peningkatan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya lingkup KKP, diantaranya adalah (1) Pelaksanaan pembangunan yang mengindahkan nilai budaya, kearifan lokal dan keragaman

SDA hayati, (2) Pengembangan dan penguatan budaya bahari dan literasi bahari, dan (3) Pemberdayaan masyarakat adat pesisir dan pulau-pulau kecil.

d. Transformasi Digital

Pengarustamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarustamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand) dan pengelolaan big data

Penyiapan layanan digital terintegrasi lingkup KKP yang mencakup penyiapan regulasi, penguatan kelembagaan, pembangunan jaringan, sarpras, meningkatkan kapasitas SDM dengan keahlian digital, melakukan kerja sama untuk menyediakan layanan digital dan one data serta penataan sistem perizinan berbasis web (on-line), termasuk penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) KKP dan peningkatan usaha kelautan dan perikanan melalui e-commerce.

1.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PUSDIK KP

Arah kebijakan Pusat Pendidikan KP 2020-2024 mengacu pada arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan nasional (RPJMN) dan arah kebijakan pembangunan KP dan BRSDM KP 2020 - 2024 yang ada. Strategi penguatan daya saing SDM merupakan prioritas utama Pusdik KP yang diarahkan untuk menghasilkan SDM unggul dan berdaya saing yang mendukung pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan.

Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan bahan kebijakan dan program, serta melaksanakan penyusunan pedoman, standar, bimbingan, monitoring, dan evaluasi tata penyelenggaraan, kebutuhan pendidikan, pengembangan dan pembinaan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan pendidikan, dan kelembagaan tenaga pendidik di bidang kelautan dan perikanan. Arah kebijakan pendidikan KP yang dilaksanakan diantaranya adalah:

1. Pemberian kesempatan yang lebih besar kepada putra/putri pelaku utama kelautan dan perikanan untuk memperoleh pendidikan di satuan pendidikan kelautan dan perikanan;
2. Peningkatan kualitas pembelajaran dengan pendekatan Teaching Factory dibidang kelautan dan perikanan;
3. Pengembangan sistem sertifikasi kompetensi peserta didik;
4. Pengembangan minat kewirausahaan bagi peserta didik Kelautan dan Perikanan;
5. Meningkatkan kerjasama pendidikan dengan lembaga lain.
6. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pendidikan KP.

Arah kebijakan nasional yang terkait dengan kegiatan pendidikan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Pusdik KP, adalah:

2. Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja, antara lain dengan:
 - a. pengembangan pendidikan vokasi yang mendukung pembangunan prioritas nasional yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, kemaritiman, pengembangan wilayah terutama daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, dan percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat;
 - b. pengembangan model pendidikan vokasi yang didorong oleh kerja sama dengan dunia usaha/industri;
 - c. pengembangan program studi/program keahlian/paket keahlian pendidikan vokasi berbasis kepada proyeksi kebutuhan lulusan pendidikan vokasi;
 - d. penyelesaian penyusunan kurikulum paket keahlian pendidikan vokasi berdasarkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia);
 - e. peningkatan penilaian kualitas satuan pendidikan dan kompetensi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi;
 - f. peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan;
 - g. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran pendidikan vokasi; dan

- h. pemenuhan ketersediaan, kualitas, kompetensi dan profesionalisme pendidik vokasi.
3. Meningkatkan kapasitas pendidikan tinggi sebagai pusat ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pusat pengembangan inovasi dalam mendorong pembangunan;
4. Meningkatkan kualitas pendidikan karakter dan budi pekerti.

1.4. **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI POLITEKNIK AUP**

Dalam upaya mendukung strategi pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan 2020-2024 dengan mengacu pada arah kebijakan BPRSDM KP dan Pusdik KP Tahun 2020-2024, maka peran Politeknik AUP adalah menghasilkan SDM Unggul Kelautan dan Perikanan sebagai aset negara yang mampu mengelola bisnis kelautan dan perikanan berbasis IPTEK yang inovatif dan relevan secara berkelanjutan.

Untuk itu pengembangan Politeknik AUP diarahkan menuju pada terbentuknya suatu lembaga pendidikan vokasi bidang kelautan dan perikanan yang mampu :

1. Menghasilkan sumberdaya manusia unggul berbasis iptek yang inovatif sehingga mampu berkarya dan berusaha/berbisnis di pemerintahan , swasta dan unut kerja lainnya di sektor kelautan dan perikanan;
2. Menata kelola pendidikan vokasi yang inovatif dan produktif sehingga mampu bersaing secara International.

1.5. **STRATEGI POLITEKNIK AUP**

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai Pusdik KP pada tahun 2020-2024, maka strategi yang dikembangkan adalah sebagai berikut.

3.5.1 Sasaran Strategis 1 : Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat

Strategi 1: Membangun sistem penyelenggaraan pendidikan berbasis kerjasama industri.

Langkah operasional:

1. Menghasilkan lulusan pendidikan yang membentuk startup/wirausaha baru dan tenaga kerja profesional.
2. Mengembangkan kurikulum vokasi dengan pendekatan “*Teaching Factory*” dan memperkuat *link and match* berbasis kerjasama dengan industri.
3. Memperkuat Pendidikan Tinggi Berkualitas (Pembangunan kampus pendidikan dan riset)
4. Memperkuat karakter tangguh dan mandiri dalam membangun pola pembelajaran kewirausahaan.
5. Mengembangkan modul, kurikulum pendidikan dan pelatihan berbasis SKKNI dan kebutuhan organisasi
6. Mengembangkan sertifikasi kompetensi KP sesuai kebutuhan DUDI berkerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi.
7. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga pelatih sesuai bidang keahlian/keilmuan yang dibutuhkan.
8. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan kurikulum.
9. Penumbuhan budaya maritim.

Strategi 2: Membangun sistem pendidikan ASN KKP sesuai kebutuhan organisasi.

Berkaitan dengan agenda peningkatan kapasitas aparaturnya sebagai motivator dan dinamisator pembangunan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan, Pusdik KP mempunyai 2 (dua) sasaran pokok dengan arah kebijakan sebagai berikut:

Sasaran Pertama: Pemenuhan kompetensi administrasi, untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada pemenuhan kompetensi bidang administrasi, antara lain:

- a. Pengembangan kompetensi dalam bidang manajemen perkantoran;
- b. Pengembangan kompetensi dalam bidang manajemen keuangan;
- c. Pengembangan kompetensi dalam bidang manajemen SDM;
- d. Pengembangan kompetensi dalam bidang sistem manajemen mutu;

- e. Pengembangan kompetensi dalam bidang sistem manajemen lingkungan;
- f. Penumbuhan jiwa kewirausahaan instansi pemerintah; dan
- g. Pengembangan kompetensi dalam bidang manajemen public teknis substansi.

Sasaran Kedua : Pemenuhan kompetensi teknis substansi, untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pengembangan diletakkan pada pemenuhan kompetensi, antara lain:

- a. Pengembangan kompetensi bidang penangkapan ikan;
- b. Pengembangan kompetensi bidang pembudidayaan ikan;
- c. Pengembangan kompetensi bidang pengolahan ikan;
- d. Pengembangan kompetensi bidang konservasi sumberdaya ikan;
- e. Pengembangan kompetensi bidang pemberdayaan masyarakat;
- f. Pengembangan kompetensi bidang permesinan perikanan

Strategi 3: Membangun sistem pendidikan KP berbasis digital/ Teknologi Informasi

Langkah Operasional:

1. Mengembangkan sistem pendidikan KP sesuai kebutuhan pelaku utama, dengan metode pembelajaran jarak jauh e-learning dan online training.
2. Menyusun NSPK pendidikan KP berbasis digital.
3. Menyusun modul, kurikulum, dan materi pendidikan KP digital.
4. Menyiapkan SDM dengan keterampilan teknologi informasi.
5. Menyiapkan perangkat/sarana untuk pendidikan, berbasis digital (*e-learning*).
6. Pengertian Pendidikan Jarak Jauh yaitu :
 - Proses pendidikan yang terorganisasi yang menjembatani keterpisahan antara siswa dengan pendidik dan dimediasi oleh pemanfaatan teknologi, dan pertemuan tatap muka yang minimal.
 - Pendidikan jarak jauh ditawarkan lintas ruang dan waktu sehingga siswa memperoleh fleksibilitas belajar dalam waktu dan tempat yang berbeda, serta menggunakan beragam sumber belajar.
 - Biasanya berbentuk pendidikan massif.
 -

Seusai dengan UU No.12 tentang Pendidikan Tinggi pasal 31

- 1) Pendidikan jarak jauh merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
- 2) Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. memberikan layanan Pendidikan Tinggi kepada kelompok Masyarakat yang tidak dapat mengikuti Pendidikan secara tatap muka atau reguler; dan
 - b. memperluas akses serta mempermudah layanan Pendidikan Tinggi dalam Pendidikan dan pembelajaran.
- 3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Proses Pembelajaran :

- a. Memiliki rancangan belajar yang jelas dan dipatuhi pelaksanaannya: belajar mandiri, belajar terbimbing, belajar di kampus/USBJJ, residensial, terstruktur, menggunakan beragam sumber belajar
- b. memanfaatkan sumber belajar yang tidak harus berada pada satu tempat yang sama dengan peserta didik;
- c. menggunakan modus pembelajaran yang peserta didik dengan pendidiknya terpisah;
- d. menekankan belajar secara mandiri, terstruktur, dan terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar;
- e. menekankan interaksi pembelajaran berbasis TIK, meskipun tetap memungkinkan adanya pembelajaran tatap muka secara terbatas
- f. menggunakan bahan ajar dalam bentuk *e-learning* dan kombinasinya dengan bahan ajar lain dalam beragam bentuk, format, media dan dari beragam sumber;

- g. Sumber belajar tersebut merupakan bahan ajar dan berbagai informasi yang dikembangkan dan dikemas dalam beragam bentuk berbasis TIK, yang digunakan dalam proses pembelajaran
- h. Memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK sebagai sumber belajar yang dapat diakses setiap saat;

3.5.2 Strategi : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di lingkungan Politeknik AUP

Langkah Operasional:

1. Memperkuat tata kelola dan kerjasama pengembangan SDM yang dilandasi prinsip-prinsip konsultatif, komprehensif, fleksibel, transparan,
2. Meningkatkan pranata dan kelembagaan birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima melalui pembinaan dan pendampingan Reformasi Birokrasi, pelaksanaan SAKIP, dan menuju satker berstatus WBK/WBBM.
3. Pengelolaan perencanaan dan anggaran pembangunan secara akuntabel.
4. Pengelolaan keuangan sesuai prinsip pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

1.6. KEGIATAN PRIORITAS POLITEKNIK AUP

Kegiatan prioritas untuk mendukung pencapaian pembangunan KP, sesuai dengan strategi di atas ditetapkan sebagai berikut:

1. Menetapkan kurikulum Vokasi dan penyediaan sarana pembelajaran Perikanan berbasis Usaha (DUDI), bertujuan Politeknik AUP memiliki kurikulum vokasi dan sarana pembelajaran yang lengkap dan moderen berbasis Usaha (DUDI) dengan indikator keberhasilan aplikasi kurikulum bersinergi dengan TEFA dan Unit Usaha (DUDI);

2. *Up Grade* Dosen untuk melaksanakan pendidikan vokasi, bertujuan dosen Politeknik AUP mampu melaksanakan pendidikan vokasi dengan indikator keberhasilan dosen menghasilkan pedoman praktek yang berciri usaha untuk taruna;
3. Melaksanakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan model vokasi, bertujuan terjadinya harmonisasi pendidikan vokasi dan pendidikan kepribadian Perikanan di Politeknik AUP dengan indikator keberhasilan taruna melaksanakan praktek usaha secara mandiri baik di dalam maupun di luar kampus;
4. Menjalin kemitraan yang sinergi dengan unit usaha/bisnis, bertujuan Politeknik AUP memiliki mitra unit usaha untuk penyelenggaraan pendidikan vokasi dengan indikator keberhasilan unit-unit usaha berperan dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi;
5. Menyediakan galeri teknologi yang dibutuhkan masyarakat dan pelaku usaha untuk kemajuan usahanya, bertujuan Politeknik AUP memiliki galeri teknologi yang dibutuhkan masyarakat dan pelaku usaha dengan indikator keberhasilan Politeknik AUP menjadi konsultan kebutuhan teknologi bagi masyarakat dan pelaku usaha;
6. Menghasilkan inovasi teknologi komersial, bertujuan dosen Politeknik AUP produktif menghasilkan inovasi teknologi komersial dengan indikator keberhasilan teknologi yang dihasilkan digunakan masyarakat, pelaku usaha (DUDI) dan kemajuan pendidikan;
7. Menyediakan galeri (*Hard & Soft*) teknologi yang dihasilkan, bertujuan Politeknik AUP sebagai Pusat Inovasi Teknologi dengan indikator keberhasilan dosen menjadi konsultan komersial serta aktif di pasar teknologi;
8. Melaksanakan pelatihan/pendampingan kepada masyarakat di desa mitra dan non mitra, bertujuan Politeknik AUP dapat secara rutin melatih/mendampingi masyarakat dengan indikator keberhasilan masyarakat desa mitra dan non mitra memiliki sertifikat yang dibutuhkan untuk bekerja di bidang perikanan;
9. Melaksanakan transfer teknologi kepada masyarakat desa mitra dan non mitra, bertujuan Politeknik AUP menjadi distributor teknologi

dengan indikator keberhasilan masyarakat mengadopsi terhadap teknologi perikanan;

10. Memfasilitasi terjadinya inkubasi *start-up* bisnis perikanan di desa mitra dan non mitra, bertujuan Politeknik AUP menjadi fasilitator inkubasi bisnis perikanan kepada calon *start-up* di desa mitra dengan indikator keberhasilan munculnya *start-up* di desa mitra dan non mitra;
11. Memaksimalkan pelayanan administrasi terhadap kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, bertujuan Politeknik AUP memberikan pelayanan prima di bidang administrasi terhadap kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan indikator keberhasilan pelayanan administrasi untuk kegiatan Tri Dharma mudah dan cepat;
12. Mengoptimalkan pelayanan sumberdaya (5 M) terhadap kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, bertujuan Politeknik AUP memberikan pelayanan sumberdaya (5 M) secara optimal terhadap kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan indikator keberhasilan setiap kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat dukungan sumberdaya (5 M) secara optimal;
13. Sinergitas pelaksanaan KISS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, bertujuan Politeknik AUP melaksanakan KISS secara sinergi dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan indikator keberhasilan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi harmonis, efektif dan produktif.

Penyelenggaraan Pendidikan untuk mencapai Visi Misi, Tujuan, dan Strategi serta operasionalnya di Politeknik AUP dilaksanakan secara bertahap selama periode 2021 – 2024 sebagai berikut :

Tahun 2021 :

- a. Taruna melaksanakan praktek usaha secara mandiri baik di dalam maupun di luar kampus;
- b. Unit-unit usaha berperan dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi;
- c. Politeknik AUP menjadi konsultan kebutuhan teknologi bagi masyarakat dan pelaku usaha;

- d. Masyarakat pesisir memiliki sertifikat yang dibutuhkan untuk bekerja.

Tahun 2022 :

- a. Teknologi yang dihasilkan banyak digunakan masyarakat dan pelaku usaha;
- b. Masyarakat familiar terhadap teknologi.

Tahun 2023 :

- a. Dosen menjadi konsultan komersial serta aktif di pasar teknologi;
- b. Munculnya *start-up – start-up* dari desa mitra.

Tahun 2024 :

Terwujudnya lulusan sebagai sumberdaya manusia unggul yang mampu berkarya dan berusaha di sektor kelautan dan perikanan.

1.7. KERANGKA REGULASI

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan pendidikan Politeknik AUP, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembuatan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur penyelenggara organisasi.

Dalam Rencana Strategis Politeknik AUP 2020 – 2024, kerangka regulasi yang disiapkan akan mengacu pada program regulasi nasional yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Rencana Strategis Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang meliputi:

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sistem Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan;
2. Keputusan Direktur Politeknik AUP tentang Kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Direktur Politeknik AUP tentang Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi;
4. Keputusan Direktur Politeknik AUP tentang Tata Kehidupan Kampus;
5. Keputusan Direktur Politeknik AUP tentang Kurikulum dan Silabi;
6. Keputusan Direktur Politeknik AUP tentang Penjaminan Mutu Pendidikan.

1.8. **KERANGKA KELEMBAGAAN**

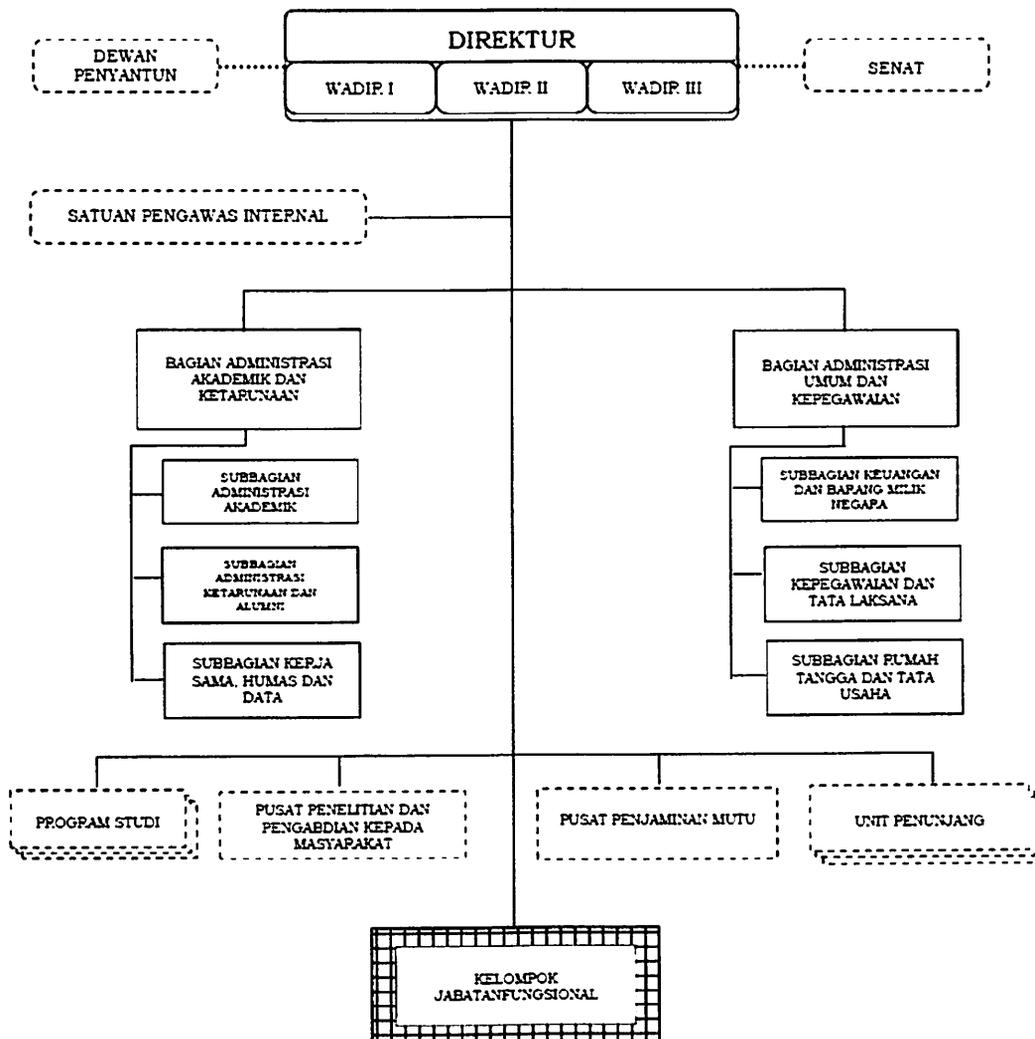
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 45/PERMEN-KP/2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Ahli Usaha Perikanan, maka Struktur Organisasi Politeknik AUP sebagai berikut ini:

Politeknik AUP menyelenggarakan Program Diploma 4 dan Pascasarjana Terapan memiliki 7 program studi, yaitu :

1. Teknologi Penangkapan Ikan Program Sarjana Terapan;
2. Permesinan Perikanan Program Sarjana Terapan;
3. Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan Program Sarjana Terapan;
4. Teknologi Akuakultur Program Sarjana Terapan;
5. Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan Program Sarjana Terapan;
6. Penyuluhan Perikanan Program Sarjana Terapan; dan
7. Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Program Magister Terapan.

Kelembagaan Politeknik AUP akan terus dikembangkan dengan membuka Program Pendidikan D1, Program Studi Baru Pascasarjana Terapan S2 serta Program Pendidikan Pascasarjana Terapan S3.

Gambar 1. Struktur Organisasi Politeknik AUP



BAB IV
INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA PUSAT PENDIDIKAN KP

1. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Pusat Pendidikan KP Tahun 2020 – 2024

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Pusat Pendidikan KP disusun mengacu pada Indikator Kinerja BRSDM Tahun 2020-2024. Rincian Indikator Kinerja Pusat Pendidikan KP Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut ini:

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat melalui kegiatan pendidikan KP	1	Presentase lulusan yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan (%)	75	75	75	75	75
		2	Presentase lulusan satuan pendidikan KP yang melakukan rintisan wirausaha di bidang kelautan dan perikanan (%)	5	10	15	17	19
		3	Jumlah desa mitra pendidikan KP yang meningkatkan kompetensinya (Desa)	1	1	1	1	1
		4	Jumlah lulusan satuan pendidikan KP yang bersertifikat kompetensi (Orang)	2.450	2.479	2.735	2.579	2.996
		5	Jumlah peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten (Orang)	8.171	8.308	8.668	8.843	9.068
		6	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan KP yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	21	17	17	17	17

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat	7	Jumlah jejaring dan/atau kerjasama pendidikan yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen)	22	34	34	34	34
		8	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik (%)	50	55	60	65	75
		9	Jumlah lembaga pendidikan terstandar (Lembaga)	10	17	17	17	17
		10	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang meningkat kompetensinya (Orang)	343	355	360	365	370
		11	Jumlah pengabdian pendidikan tinggi KP (Paket)	17	17	17	17	17
		12	Jumlah Aparatur KKP yang ditingkatkan jenjang pendidikan formalnya (Orang)	180	180	235	240	250
		13	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pendidikan KP yang tersusun sesuai kaidah yang berlaku (Dokumen)	50	50	50	50	50
		14	Nilai hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan KP (Nilai)	80	80	80	80	80
2	Tata kelola Pemerintahan yang baik	15	Indeks Profesionalitas ASN Pendidikan KP (Indeks)	72	72	72	72	72
		16	Persentase unit kerja pendidikan KP yang menerapkan	82	82	82	82	82

		sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)					
	17	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran pendidikan KP (Nilai)	Baik (88)				
	18	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pendidikan KP dibandingkan realisasi anggaran Pendidikan KP TA 2019	1%	1%	1%	1%	1%
	19	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pusat Pendidikan KP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	60	60	60	60	60
	20	Nilai anggaran pendidikan KP (Nilai)	85	85	85	85	85

2. Indikator Kinerja Sasaran Politeknik AUP Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Sasaran Strategis Politeknik AUP disusun mengacu pada Indikator Kinerja Pusat Pendidikan KP Tahun 2020-2024. Rincian Indikator Kinerja Politeknik AUP Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut ini:

a. Indikator Kinerja Politeknik AUP Tahun 2020

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2020
1	Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat melalui kegiatan pendidikan KP	1	Persentase lulusan Politeknik AUP Jakarta yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan (%)	75
		2	Persentase lulusan Politeknik AUP Jakarta yang melakukan rintisan wirausaha di bidang kelautan dan perikanan (%)	5

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2020
		3	Desa mitra pendidikan KP yang meningkat kompetensinya	1
		4	Lulusan Politeknik AUP Jakarta yang bersertifikat kompetensi (Orang)	434
		5	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten di Politeknik AUP Jakarta (Orang)	1.514
		6	Sarana dan prasarana yang ditingkatkan kapasitasnya di Politeknik AUP Jakarta (Unit)	1
		7	Jejaring dan/atau kerjasama Politeknik AUP Jakarta yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti (Dokumen)	1
		8	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik di Politeknik AUP Jakarta (%)	50
		9	Pendidik dan tenaga kependidikan Politeknik AUP Jakarta yang meningkat kompetensinya (Orang)	23
		10	Pengabdian pendidikan tinggi KP di Politeknik AUP Jakarta (Paket)	3
		11	Nilai hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan KP di Politeknik AUP Jakarta (Nilai)	80
2	Tata kelola Pemerintahan yang baik pada Politeknik AUP Jakarta	12	Indeks Profesionalitas ASN Politeknik AUP Jakarta (Indeks)	72

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2020
		13	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik AUP Jakarta (Nilai)	Baik (88)
		14	Persentase unit kerja Politeknik AUP Jakarta yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82
		15	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Politeknik AUP Jakarta dibandingkan realisasi anggaran Politeknik AUP Jakarta TA 2019	1%
		16	Nilai kinerja anggaran Politeknik AUP Jakarta (Nilai)	85

b. Indikator Kinerja Politeknik AUP Tahun 2021-2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2021	2022	2023	2024	
1	Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat melalui kegiatan pendidikan KP	1	Persentase Lulusan satuan pendidikan KP yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan (%)	75	75	75	75
		2	Lulusan satuan pendidikan KP yang melakukan rintisan wirausaha di bidang kelautan dan perikanan (Orang)	40	42	68	85
2	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang	3	Lulusan satuan pendidikan KP yang bersertifikat kompetensi (Orang)	403	283	401	446

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2021	2022	2023	2024	
	Kompeten	4	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten (Orang)	1.499	1.549	1.549	1.549
		5	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik (%)	55	55	55	55
		6	Pendidik dan tenaga kependidikan yang meningkat kompetensinya (Orang)	13	20	20	20
3	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan KP Yang Terstandar	7	Sarana pendidikan KP yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	1	1	1	1
		8	Prasarana Pendidikan Tinggi KP yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	1	1	1	1
4	Terselenggaranya Pengabdian Pendidikan Tinggi KP	9	Penelitian Terapan Pendidikan Tinggi KP (Paket)	1	1	1	1
		10	Pengabdian kepada masyarakat KP (Paket)	1	1	1	1
5	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Politeknik AUP	11	Kerjasama pendidikan kelautan dan perikanan yang disepakati (Dokumen)	3	5	5	5
		12	Nilai hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan KP (Nilai)	81	81	81	81
		13	Persentase penyelesaian temuan	100	100	100	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			2021	2022	2023	2024
		LHP BPK Politeknik AUP (%)				
		14 Indeks Profesionalitas ASN Politeknik AUP (Indeks)	73	73	73	73
		15 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Politeknik AUP (Nilai)	80	80	80	80
		16 Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	84	84	84	84
		17 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik AUP (%)	65	65	65	65
		18 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Politeknik AUP (Nilai)	89	89	89	89
		19 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Politeknik AUP (Nilai)	86	86	86	86
		20 Unit kerja lingkup satker Politeknik AUP yang dibangun untuk diusulkan menuju WBK (satker)	1	1	1	1
		21 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal (%)	100	100	100	100

4.2 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*).

Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di Politeknik AUP merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit kerja lingkup Pusdik KP.

4.3 KERANGKA PENDANAAN

Kegiatan Politeknik AUP dalam Rancangan Renstra mengusulkan rencana pendanaan melalui APBN tahun 2020-2024 dan PNBK Tahun 2020-2024. Anggaran tersebut akan didistribusikan setiap tahunnya untuk membiayai Kegiatan Politeknik AUP sebagaimana Lampiran 2

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Politeknik AUP tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahun, yang disusun dengan tujuan pertama, untuk mewujudkan Politeknik AUP yang mampu menghasilkan sumberdaya manusia unggul yang mampu berkarya dan berusaha di pemerintahan dan swasta sektor kelautan dan perikanan serta yang kedua Politeknik AUP memiliki tata kelola pendidikan vokasi yang inovatif dan produktif sehingga mampu bersaing secara International.

Rencana Strategis Politeknik AUP tahun 2020-2024 sengaja dibuat agar digunakan serta dijadikan acuan dalam melaksanakan fungsi manajemen, menggunakan unsur manajemen serta memainkan dinamika manajemen yang bermuara kepada penilaian terhadap kinerja yang telah ditetapkan, di dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Vokasi Perikanan secara utuh dan komprehensif di Politeknik AUP yang akan membuka Program Pascasarjana Terapan S3.

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Vokasi Perikanan di Politeknik AUP tanpa Renstra ibarat orang buta yang sedang berjalan, sebaliknya Renstra Politeknik AUP yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Vokasi di Politeknik AUP, ibarat peluru yang tidak pernah meledak. Oleh karena itu mari kita sama-sama mengawal, menjaga dan memonitor supaya Renstra tersebut bisa dilaksanakan sehingga kedua kondisi tersebut di atas tidak pernah terjadi.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis Politeknik AUP tahun 2020-2024, maka secara cermat dilakukan penyesuaian. Oleh karena itu, mari kita secara bersama-sama untuk melaksanakan sesuai kebutuhan.

Lampiran 2
Rencana Strategis Politeknik AUP Tahun 2020-2024

Matriks Kinerja Kerangka Pendanaan Politeknik Ahli Usaha Perikanan

PROG/ KEG	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp.)					TOTAL 2020-2024 (Rp.)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Pendidikan Kelautan dan Perikanan							74.659.994.000	101.384.663.000	106.453.896.150	106.453.896.150	106.453.896.150	495.406.345.450
	Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten						22.340.139.000	26.892.507.000	28.237.132.350	28.237.132.350	28.237.132.350	133.944.043.050
	<i>Jumlah peserta Pendidikan vokasi kelautan dan per yang kompeten (orang)</i>	1514	1.499	1.549	1.549	1.549						
Pengabdian Pendidikan Tinggi KP							647.050.000	616.181.000	646.990.050	646.990.050	646.990.050	3.204.201.150
	<i>Jumlah Pengabdian Pendidikan Tinggi KP (paket)</i>	3	1	1	1	1						

PROG/ KEG	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp.)					TOTAL 2020-2024 (Rp.)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Sarana dan Prasarana Pendidikan KP						3.670.033.000	21.778.997.000	22.867.946.850	22.867.946.850	22.867.946.850	94.052.870.550
	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan KP (unit)</i>	1	1	1	1	1						
	Layanan Dukungan Manajemen Satker						288.815.000	429.092.000	450.546.600	450.546.600	450.546.600	2.069.546.800
	<i>Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker (layanan)</i>	1	1	1	1	1						
	Layanan Perkantoran						47.713.957.000	51.667.886.000	54.251.280.300	54.251.280.300	54.251.280.300	262.135.683.900
	<i>Jumlah Layanan Perkantoran (layanan)</i>	1	1	1	1	1						
	<i>Gaji dan Tunjangan (bulan)</i>	12	12	12	12	12						
	<i>Operasional dan Pemeliharaan Kantor (bulan)</i>	12	12	12	12	12						